



2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Perhubungan*



Disusun oleh:

Biro Komunikasi dan Informasi Publik





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran capaian sasaran strategis serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung perwujudan program komunikasi publik Kementerian Perhubungan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melakukan berbagai upaya dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program sebagai pedoman pembangunan sektor perhubungan. LKIP ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi, serta perwujudan keberhasilan program-program strategis dalam mendukung tugas Kementerian Perhubungan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan capaian kinerja ini tidak lepas dari kerja sama, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan, dan berperan aktif dalam penyusunan LKIP Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2023 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Budi Rahardjo





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2023 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mendukung misi Kementerian Perhubungan. Berdasarkan indikator kinerja utama, Biro berhasil melampaui target yaitu Reputasi Positif mencapai nilai 83,71 (105,96%), Profesionalisme ASN mencapai nilai 76,04 (101,39%), dan Kualitas Penyelenggaraan mencapai nilai Perkantoran 76,11 (101,48%).



Dalam pengelolaan anggaran, realisasi sebesar 99,92% dari total Rp 26,43 miliar mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya. Penyerapan anggaran mendukung berbagai program strategis seperti pengelolaan media sosial, kampanye kolaborasi, dan peningkatan hubungan media. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan melalui inovasi komunikasi digital, penguatan sinergi pemangku kepentingan, dan pengembangan analisis dampak. Laporan ini diharapkan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan di masa depan.





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Organisasi.....	5
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	5
C. Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik	10
D. Permasalahan Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	29
LAMPIRAN	31





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Organisasi

Kementerian Perhubungan, yang sebelum tahun 2010 dikenal sebagai Departemen Perhubungan, memiliki unit kerja kehumasan yang berada di bawah Unit Kerja Eselon II Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Mengingat pentingnya peran organisasi yang menangani kehumasan, diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2006. Dalam Bab XIV keputusan tersebut, dibentuklah Pusat Komunikasi Publik sebagai unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, dipimpin oleh seorang Kepala.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik saat ini merupakan salah satu unsur penunjang strategis di Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro ini memegang peran penting dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan komunikasi serta penyampaian informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan yang keberadaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas dan fungsi berupa:

“Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik serta juru bicara Kementerian Perhubungan”





Dalam melaksanakan tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Pemberitaan dan Media Sosial;
- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, serta dukungan reformasi birokrasi, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.





Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik serta penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan;
- b) Penyiapan bahan penanganan krisis komunikasi, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta pelaporan program komunikasi publik;
- c) Penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan, keuangan, dukungan reformasi birokrasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, Pengelolaan layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara serta tata usaha dan rumah tangga Biro

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemberitaan dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media melalui pemberian informasi publik, penerbitan siaran pers tanggapan/, pembaca;
- b. Penyiapan bahan penyusunan, dan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial;





- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan aktivitas komunikasi publik dan membentuk opini sektor transportasi melalui jejaring warganet dan komunitas.

Bagian Pemberitaan dan Media Sosial terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik, edukasi publik, pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik dalam bentuk publikasi pesan layanan masyarakat dan penerbitan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik dalam rangka edukasi publik melalui penyelenggaraan event pameran, *below the line*, sosialisasi, promosi dan kampanye kebijakan dan kinerja pimpinan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diperkuat oleh 64 personil, antara lain didukung oleh:



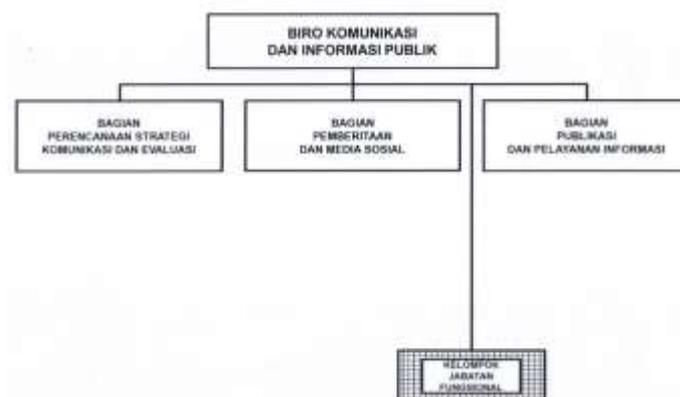


- 1) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- 2) Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi Dan Evaluasi
- 3) Kepala Bagian Publikasi Dan Pelayanan Informasi
- 4) Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Sosial
- 5) Pranata Humas Ahli Muda : 2 Orang
- 6) Pranata Humas Ahli Pertama : 17 Orang
- 7) Penelaah Teknis Kebijakan : 27 Orang
- 8) Penyusun Rencana Program Anggaran dan Renstra : 1 Orang
- 9) Pranata Keuangan APBN Terampil : 1 Orang
- 10) Pengolah Data dan Informasi : 1 Orang
- 11) Pengadministrasi Perkantoran : 1 Orang
- 12) Perencana Ahli Pertama : 2 Orang
- 13) PPNPN : 8 Orang

Dengan Latar belakang (*background*) Pendidikan:

1. S2 : 7 orang
2. S1 : 48 orang
3. D-III : 7 orang
4. SLTA : 2 orang

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mencapai kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik secara optimal. Berikut ini adalah struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik berdasarkan PM 17 Tahun 2022:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik





C. Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Sebagai unit kerja yang berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka pelaksanaan kegiatan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan harus merupakan turunan dari sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dari Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang tertuang dalam KP 1365 Tahun 2023 diketahui bahwa Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berkorelasi dengan Komunikasi dan Informasi Publik adalah:

“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan” dengan 3 (tiga) Sasaran Program yang harus didukung oleh unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yakni:

1. “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Reputasi Positif Kementerian Perhubungan;
2. “Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
3. “Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatkan Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Sasaran Program tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk menentukan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan di tahun 2020-2024.

Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan adalah **“Pengelolaan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub di Bidang Perhubungan”**.





D. Permasalahan Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam sektor transportasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menghadapi beberapa permasalahan strategis pada tahun 2024. Permasalahan ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta pencapaian tujuan strategis kementerian. Berikut adalah permasalahan strategis yang diidentifikasi:

1) Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Komunikasi Publik

Masih terdapat kesenjangan kompetensi di antara pengelola komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pengelolaan komunikasi yang komprehensif, termasuk kemampuan strategis seperti critical thinking, kreativitas, komunikasi efektif, dan kolaborasi (4C skills). Kesenjangan ini dapat memengaruhi kualitas penyampaian informasi, terutama dalam merespons kebutuhan komunikasi yang dinamis dan bersifat desentralisasi;

2) Integrasi dan Sinkronisasi Antarunit Kerja

Kurangnya koordinasi antarunit kerja seringkali menyebabkan informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tidak konsisten, tumpang tindih, atau bahkan bertentangan. Ketidaksinkronan ini berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi publik, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghambat pencapaian tujuan strategis kementerian;

3) Pemutakhiran dan Penyediaan Informasi yang Relevan

Pemutakhiran informasi secara *real-time* menjadi tantangan besar bagi pengelola layanan informasi. Informasi yang tidak terkini atau tidak valid dapat mengurangi kepuasan publik serta memperlambat proses pengambilan keputusan. Dibutuhkan mekanisme validasi, verifikasi, dan pemutakhiran informasi yang lebih terintegrasi dan efektif;

4) Pengelolaan Citra dan Reputasi Kementerian

Dinamika media sosial dan opini publik yang berkembang pesat menuntut respons yang cepat, tepat, dan strategis. Penyebaran kritik atau kabar negatif dapat memengaruhi citra dan reputasi Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pengelolaan reputasi secara proaktif, termasuk





pemantauan media sosial dan penyampaian pesan positif secara berkelanjutan, menjadi prioritas utama;

5) Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders

Keterlibatan masyarakat dan stakeholders dalam proses komunikasi publik masih kurang optimal. Rendahnya kesadaran terhadap hak memperoleh informasi, serta minimnya inisiatif untuk berpartisipasi aktif, menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik;

6) Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, baik untuk publikasi, analisis data, maupun interaksi dengan masyarakat, dapat menghambat efektivitas komunikasi publik;

7) Keterbatasan Sumber Daya dalam Mendukung Program Strategis

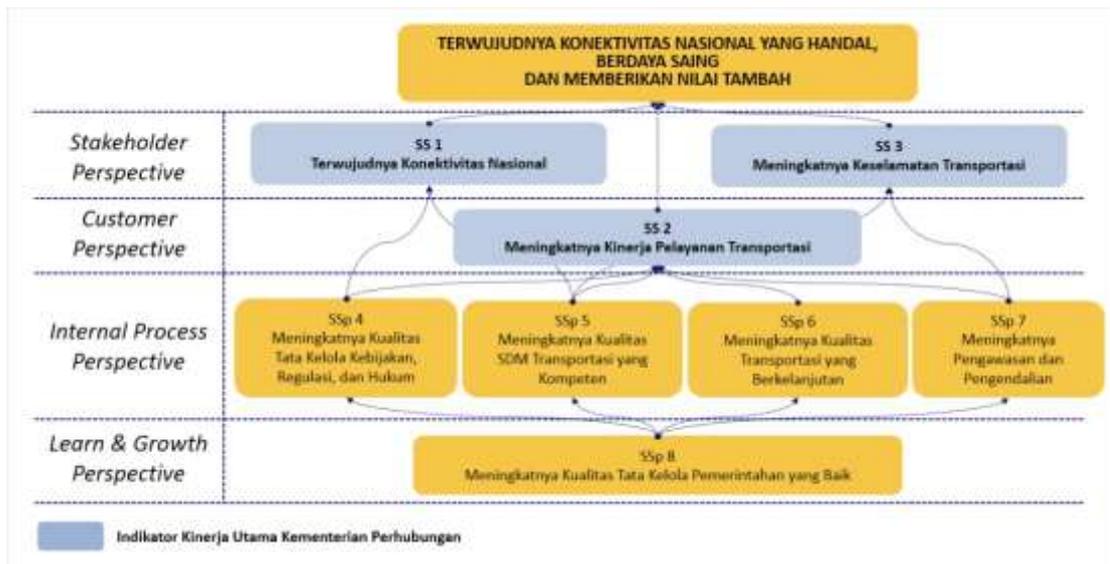
Terbatasnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun personel, menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program strategis. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan biro untuk menjalankan komunikasi yang efektif dan konsisten di seluruh unit kerja.

Dengan mengatasi permasalahan strategis ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan di tahun 2024.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis, yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan indikator output. IKSS ini dirancang dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Pendekatan ini membagi IKSS ke dalam empat perspektif utama, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Penjelasan masing-masing perspektif dapat diuraikan sebagai berikut:



Bagan 2.1: BSC Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis

Untuk mencapai kondisi yang sesuai dengan Sasaran Strategis, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, diperlukan pelaksanaan program yang terencana dan terarah. Program tersebut harus dirancang untuk mendukung proses pencapaian target dari indikator Sasaran Strategis secara efektif dan efisien.

Sasaran Strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai dan mencerminkan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan satu atau beberapa program. Sementara itu, Sasaran Program adalah hasil yang ingin dicapai dari





suatu program sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis. Sasaran Program mencerminkan keberfungsian keluaran program dalam mendukung capaian kinerja dari Sasaran Strategis. Sasaran Program ini merupakan turunan yang berfungsi sebagai penghubung antara program dengan tujuan strategis yang lebih luas. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab unit kerja Eselon I, yang berperan memastikan program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, unit kerja eselon I yang berada di atas Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah Sekretariat Jenderal. Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020-2024, sesuai dengan PM 80 Tahun 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan bertanggung jawab melaksanakan Program Dukungan Manajemen Kementerian Perhubungan. Program ini merupakan program generik dalam RENSTRA 2020-2024 yang dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, khususnya SSp-4, SSp-6, dan SSp-8. Program tersebut berperan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan operasional Kementerian untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Program dalam Program Dukungan Manajemen Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sasaran Program ini juga merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal. Untuk mencapai tujuan dan Sasaran Program yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal, diperlukan sasaran penunjang berupa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pelaksanaan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab unit kerja eselon II yang dikendalikan oleh Sekretariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.





Secara keseluruhan, untuk mendukung capaian target Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Jenderal, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus direalisasikan oleh 12 (dua belas) unit kerja di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Detail mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal ini dapat dilihat secara lebih lengkap pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Sinkronisasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dengan Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	1. Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Biro Hukum
			2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Biro Hukum
2	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Menurunnya Emisi GRK Sektor Transportasi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB)
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan
			2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan
			3. Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Biro Umum
			4. Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	Biro Umum
			5. Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan
			6. Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Biro Perencanaan
			7. Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan





			8. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Kementerian Perhubungan	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
			9. Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Biro Keuangan
			10. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
			11. Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
			12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	Biro Umum
		Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	1. Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
			2. Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
			3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
			4. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Sekretariat Jenderal	Biro Kepegawaian
			5. Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB)
		Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informasi publik Kementerian Perhubungan	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)
Meningkatnya kualitas kepemimpinan dalam meningkatkan budaya kinerja	Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan	Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)		





		Meningkatnya kapabilitas sistem informasi dan teknologi Kementerian Perhubungan	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan (Pustikomhub)
		Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1. Rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti stakeholder	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
			2. Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	Mahkamah Pelayaran
		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), serta penugasan yang dibebankan kepada BKIP, dari 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 6 (enam) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus direalisasikan oleh BKIP. BKIP bertanggung jawab mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut secara optimal.

Selain itu, BKIP juga harus menyelaraskan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan dalam sistem Krisna Selaras Kementerian Perhubungan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan yang relevan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari PERMEN BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap indikator dan sasaran yang diampu oleh BKIP selaras dengan arah kebijakan strategis kementerian dan mendukung pencapaian target nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan di mana BKIP berperan sebagai unit kerja penunjang capaian





kinerja dan bukan sebagai penanggung jawab utama atas capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut. Adapun rincian Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum;
- 2) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel;
- 3) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
- 4) Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Kementerian Perhubungan.

Dengan nomenklatur kegiatan “Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan”, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), yaitu:

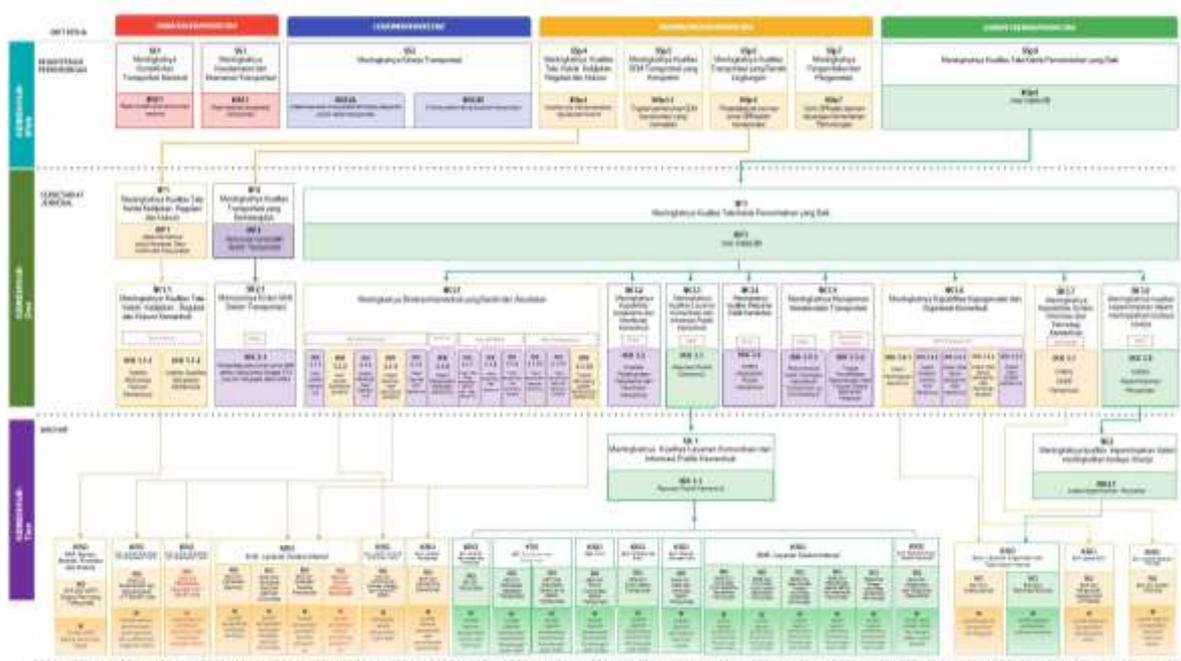
1. “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Reputasi Positif Kementerian Perhubungan;
2. “Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
3. “Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel”, dengan Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Sasaran Program tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk menentukan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kerja bagi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan di tahun 2020-2024.





Alur cascading secara detail terkait Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO) yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) hingga mencapai level Sasaran Program dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2.2: Sasaran Kegiatan Biro KIP dalam mendukung SSp Kementerian Perhubungan 2020-2024

Berdasarkan cascading yang telah disusun, dibuatlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai langkah strategis untuk mencapai target kinerja organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) yang mendukung pencapaian kinerja organisasi Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya, yang disusun berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses ini bertujuan untuk merancang rencana kinerja sebagai penjabaran operasional dari sasaran strategis dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana tersebut kemudian dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang terarah dan terukur untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditentukan.





Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), Kementerian Perhubungan, disusun sebagai bentuk komitmen untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala BKIP, Budi Rahardjo, S.Sos., M.Si., sebagai pihak pertama, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA., sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian ini, pihak pertama berkomitmen untuk mencapai target kinerja sesuai dokumen perencanaan, yang bertujuan mendukung capaian kinerja jangka menengah kementerian. Sementara itu, pihak kedua akan memberikan supervisi, melakukan evaluasi capaian kinerja, serta memberikan penghargaan atau sanksi sesuai hasil pencapaian target.

BKIP menetapkan tiga Sasaran Kegiatan utama sebagai bagian dari target kinerja 2024. Sasaran tersebut mencakup:

- 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik, dengan indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan, yang ditargetkan mencapai nilai 79;
- 2) Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dengan indikator Profesionalisme ASN, yang ditargetkan mencapai nilai 75;
- 3) Meningkatnya Birokrasi BKIP yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran, yang juga ditargetkan mencapai nilai 75.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, alokasi anggaran tahun 2024 direncanakan sebesar Rp26.703.880.000, yang terbagi menjadi tiga kegiatan utama: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp18.468.281.000, Pengelolaan Organisasi dan SDM sebesar Rp1.571.792.000, dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum sebesar Rp6.663.807.000.

Perjanjian ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga menjadi pedoman strategis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BKIP di tahun 2024. Dengan fokus pada peningkatan layanan komunikasi, profesionalisme ASN, dan tata kelola yang bersih, BKIP berkomitmen mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2024 Penilaian IKU dilakukan dengan melakukan survei pada semester kedua. Pengukuran capaian kinerja Reputasi Positif telah dilaksanakan dengan survei kepada publik eksternal yang bekerjasama dengan Reputasia. Dari hasil survei publik eksternal tersebut mengukur tingkat kesadaran (*awareness*), pemahaman (*understanding*), Citra/kesan positif terhadap produk komunikasi publik Kemenhub serta persentase pelayanan informasi public Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Profesionalisme ASN di Biro KIP dan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran dilakukan melalui metode self-assessment. Proses ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner/angket berupa daftar pertanyaan menggunakan *google form* kepada seluruh pegawai di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro KIP). Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data dan pandangan dari pegawai mengenai aspek profesionalisme dan kualitas penyelenggaraan perkantoran, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan kondisi faktual di lingkungan kerja secara objektif dan komprehensif.

Tabel 3.1 menyajikan capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk tahun 2024 berdasarkan tiga indikator utama. Indikator tersebut mencakup Reputasi Positif Kementerian, Profesionalisme ASN di Biro KIP, serta Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran. Setiap indikator memiliki target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tabel ini menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, serta tingkat capaian dalam bentuk persentase. Data ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Biro berhasil mencapai tujuan strategisnya dan meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan. Tabel 3.1 berikut merupakan tabel capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik:





Kementerian Perhubungan
CAPAIAN KINERJA
Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2024

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik

KODE IKK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK1.1	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79	83,71	105,96
IKK1.2	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	75	76,04	101,39
IKK1.3	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	75	76,11	101,48
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis					102,94

Berdasarkan tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik, kinerja Biro KIP secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena semua indikator kinerja utama (IKU) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan (IKK1.1), realisasi mencapai nilai 83,71 dari target 79, dengan capaian sebesar 105,96%. Hal ini menunjukkan peningkatan reputasi kementerian yang signifikan berkat efektivitas program komunikasi publik. Selanjutnya, pada indikator Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (IKK1.2), realisasi tercatat sebesar 76,04 dari target 75, dengan capaian 101,39%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan program pengembangan kompetensi ASN dalam mendukung profesionalisme kerja.

Indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran (IKK1.3) juga menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi 76,11 dari target 75, menghasilkan capaian 101,48%. Hal ini menandakan bahwa peningkatan sistem kerja dan pelayanan di perkantoran telah berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis mencapai 102,94%, yang menunjukkan keberhasilan semua indikator dalam melampaui target. Pencapaian ini mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan strategi komunikasi yang efektif, serta komitmen Biro dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja. Dengan hasil ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berhasil menunjukkan kinerja yang optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan strategis kementerian.





Keberhasilan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam melampaui target pada ketiga indikator kinerja utama (IKU) dapat dianalisis dari beberapa faktor berikut:

1) Perencanaan Strategis yang Matang

Keberhasilan melampaui target menunjukkan adanya perencanaan yang komprehensif dan relevan terhadap kebutuhan. Strategi yang disusun telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mendukung pencapaian kinerja, sehingga implementasi program berjalan sesuai arah yang diharapkan.

2) Pelaksanaan Program yang Efektif

Program-program yang dirancang untuk meningkatkan reputasi kementerian, profesionalisme ASN, dan kualitas penyelenggaraan perkantoran dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan inovatif. Contohnya, penggunaan media komunikasi yang efektif dalam membangun citra positif serta pelatihan yang ditargetkan untuk ASN dapat memberikan dampak langsung pada capaian indikator.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Digitalisasi dalam komunikasi publik dan tata kelola perkantoran kemungkinan besar menjadi salah satu pendorong capaian ini. Teknologi mempermudah aksesibilitas, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan transparansi, yang pada akhirnya berkontribusi pada capaian kinerja yang tinggi.

4) Komitmen dan Kompetensi SDM

ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memenuhi target. Hal ini didukung oleh pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan motivasi kerja, yang menghasilkan kinerja lebih baik dari yang diproyeksikan.

5) Dukungan Manajemen dan Kolaborasi

Dukungan dari manajemen yang solid, baik dalam bentuk kebijakan maupun pengawasan, turut mendorong efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal, seperti lembaga media atau mitra strategis lainnya, juga memperkuat upaya pencapaian target.





6) Kemampuan Adaptasi terhadap Tantangan

Biro menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan yang muncul. Fleksibilitas dalam menghadapi hambatan memungkinkan pelaksanaan program tetap berjalan dengan optimal tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang optimal, tetapi juga menjadi bukti bahwa pendekatan yang terstruktur, inovatif, dan kolaboratif dapat menghasilkan capaian yang signifikan. Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menjadikan pencapaian ini sebagai dasar untuk menetapkan target yang lebih tinggi di masa depan.

Capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dengan semua indikator melampaui target. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Pada indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan (IKK1.1), capaian tahun 2023 lebih tinggi, yaitu 110,99%, dibandingkan dengan 105,96% pada 2024. Hal ini terjadi meskipun target pada 2024 lebih tinggi, yaitu 79 dibandingkan 76 pada 2023. Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pada 2023 lebih efektif dalam meningkatkan reputasi kementerian. Sementara itu, indikator Profesionalisme ASN (IKK1.2) dan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran (IKK1.3) tidak memiliki data pembandingan pada 2023 karena merupakan indikator baru. Namun, pada 2024, kedua indikator ini melampaui target masing-masing dengan capaian 101,39% dan 101,48%, menunjukkan pelaksanaan program yang efektif di kedua area tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis pada 2024 mencapai 102,94%, mencerminkan kinerja yang sangat baik. Meski demikian, evaluasi terhadap strategi yang diterapkan pada 2023, khususnya untuk indikator reputasi positif, perlu dilakukan agar capaian di masa mendatang dapat lebih optimal, bahkan melebihi hasil terbaik tahun sebelumnya.

Penurunan capaian pada indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dijelaskan oleh adanya kebijakan pemblokiran (*automatic adjustment*) serta penghematan belanja perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2024. Pemblokiran ini berdampak pada keterbatasan anggaran yang dapat digunakan





untuk mendukung kegiatan komunikasi strategis, seperti kampanye publik, promosi, dan kerja sama dengan media massa. Selain itu, penghematan belanja perjalanan dinas mengurangi intensitas kegiatan langsung, seperti roadshow, kunjungan kerja, atau pelibatan masyarakat dalam berbagai forum tatap muka, yang biasanya berperan signifikan dalam membangun dan memperkuat reputasi kementerian. Kondisi ini menyebabkan penurunan efektivitas dalam menjangkau audiens yang lebih luas, meskipun secara keseluruhan capaian masih melampaui target yang ditetapkan. Kebijakan ini juga menunjukkan perlunya adaptasi strategi untuk memaksimalkan hasil kinerja meski dengan keterbatasan anggaran.

Capaian kinerja lain yaitu pada tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini menjadi salah satu capaian kinerja yang sangat membanggakan, karena menunjukkan komitmen dan upaya nyata Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat. Predikat ini juga mencerminkan keberhasilan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat reputasi positif Kementerian Perhubungan, tetapi juga menjadi bukti bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Biro mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan standar tinggi yang ditetapkan oleh KIP. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Capaian kinerja yang diraih oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 sejalan dengan Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2020-2024. Dalam rencana strategis tersebut, Biro menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat reputasi positif kementerian, dan mendorong profesionalisme ASN sebagai bagian integral dari upaya mendukung tujuan strategis Kementerian Perhubungan.





Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) menjadi bukti konkret bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi telah memenuhi indikator strategis yang ditetapkan. Selain itu, capaian indikator lainnya, seperti peningkatan reputasi positif kementerian dan kualitas penyelenggaraan perkantoran, mencerminkan keberhasilan implementasi program-program strategis yang dirancang selama periode perencanaan. Seluruh capaian ini menunjukkan bahwa Biro tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilakukan berbasis hasil (result-oriented) dan berdampak positif terhadap pelayanan publik. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pencapaian akhir yang memperkuat komitmen Biro terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arah strategis yang telah digariskan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana. Anggaran yang dialokasikan difokuskan pada program-program strategis yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Tabel 3.2 berikut merupakan tabel Capaian Sasaran Kegiatan dan Realisasi Anggaran Biro KIP tahun 2024:

KODE IKK	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
IKK1.1	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	17.072.148.000	17.056.161.258	99,91
IKK1.2	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	1.273.145.000	1.273.053.326	99,99
IKK1.3	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	6.968.613.000	6.964.978.751	99,96





Berdasarkan tabel 3.2 tersebut dapat diuraikan bahwa realisasi anggaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 menunjukkan pengelolaan yang sangat efisien dan efektif dengan tingkat serapan yang hampir maksimal pada setiap indikator. Pada indikator Reputasi Positif Kementerian Perhubungan (IKK 1.1), dari anggaran sebesar Rp17.072.148.000, terealisasi Rp17.056.161.258 atau 99,91%. Penggunaan anggaran ini diarahkan pada program-program strategis, seperti kampanye komunikasi publik dan pengelolaan media sosial, meskipun ada kendala berupa pemblokiran automatic adjustment. Untuk indikator Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (IKK 1.2), serapan anggaran hampir sempurna, yakni 99,99%, dengan total anggaran Rp1.273.145.000. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pelatihan, workshop, dan program pengembangan kompetensi ASN secara optimal.

Sementara itu, pada indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran (IKK 1.3), dari anggaran sebesar Rp6.968.613.000, terealisasi Rp6.964.978.751 atau 99,96%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur kantor, implementasi teknologi informasi, dan efisiensi layanan administrasi. Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran pada ketiga indikator ini sangat tinggi, dengan rata-rata di atas 99%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Biro dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan penghematan, pelaksanaan program strategis tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Realisasi anggaran yang digunakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana. Anggaran yang dialokasikan difokuskan pada program-program strategis yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan Reputasi Positif Kementerian Perhubungan (IKK1.1), anggaran digunakan untuk pelaksanaan kampanye komunikasi publik, pengelolaan media sosial, produksi konten informatif, serta kerja sama dengan





media massa dan influencer. Meskipun pada tahun 2024 terdapat pemblokiran *automatic adjustment* dan penghematan belanja perjalanan dinas, Biro KIP berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Pengalihan dana dari pos yang diblokir atau dihemat dialokasikan ke kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan reputasi, seperti pengembangan platform digital dan event virtual yang lebih ekonomis namun efektif.

Dalam upaya meningkatkan Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik (IKK1.2), anggaran dialokasikan untuk program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Kegiatan seperti workshop, seminar, dan kursus bersertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ASN. Penggunaan metode pelatihan online juga membantu efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Untuk Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran (IKK1.3), anggaran digunakan untuk perbaikan infrastruktur kantor, implementasi teknologi informasi untuk efisiensi kerja, dan peningkatan layanan administrasi. Investasi dalam sistem manajemen dokumen elektronik dan aplikasi internal membantu meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan perkantoran.

Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran juga difokuskan pada peningkatan keterbukaan informasi publik. Anggaran digunakan untuk mengembangkan layanan informasi yang transparan, seperti pembaruan situs web, sistem e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan pelatihan bagi petugas informasi.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, memastikan setiap dana yang digunakan sesuai dengan Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2020-2024 dan perjanjian kinerja. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan penghematan, Biro berhasil memprioritaskan program-program penting dan mengalokasikan dana secara efektif untuk mencapai dan bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang baik ini tidak hanya mendukung pencapaian kinerja organisasi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Perhubungan.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan berhasil mencapai dan melampaui target pada semua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan strategis, pelaksanaan program yang terarah, dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Meski menghadapi tantangan seperti pemblokiran anggaran dan penghematan belanja perjalanan dinas, Biro tetap mampu mengoptimalkan anggaran untuk mendukung program prioritas. Keberhasilan ini juga tercermin dalam penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), yang memperkuat reputasi positif kementerian serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Namun, terdapat penurunan capaian indikator reputasi positif dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan perlunya evaluasi strategi untuk mengatasi kendala anggaran dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Selain itu, keberhasilan dalam indikator Profesionalisme ASN dan Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran menjadi bukti kuat bahwa pengembangan SDM dan tata kelola yang bersih telah dilaksanakan dengan baik.

B. Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan capaian kinerja, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi tantangan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP). Saran berikut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, dengan fokus pada pengembangan strategi komunikasi, optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target yang lebih ambisius, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat peran BKIP dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam menyusun strategi pada tahun 2025:





- 1) **Peningkatan Strategi Komunikasi Publik:**
Mengembangkan metode kampanye yang lebih kreatif dan berbasis teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien serta memperkuat kolaborasi dengan media dan influencer untuk meningkatkan eksposur pesan-pesan strategis kementerian.
- 2) **Optimalisasi Anggaran:** Mengalokasikan anggaran dengan lebih fokus pada kegiatan berorientasi hasil yang memiliki dampak besar terhadap reputasi publik dan pelayanan informasi serta mencari alternatif sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan strategis, seperti melalui kemitraan publik-swasta.
- 3) **Pengembangan Kompetensi ASN:** Melanjutkan pelatihan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang komunikasi publik, teknologi, dan pelayanan informasi serta meningkatkan motivasi ASN melalui program penghargaan atas capaian kinerja individu maupun tim.
- 4) **Pemanfaatan Teknologi Digital:** Mengembangkan platform digital yang lebih interaktif untuk memudahkan penyebaran informasi dan pelayanan public serta memanfaatkan analitik data untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun strategi komunikasi yang lebih relevan.
- 5) **Evaluasi Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan strategi untuk memastikan kesesuaian dengan target dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan yang lebih holistik.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan.





LAMPIRAN

Lampiran I : Manual Perhitungan IKU

	Sample Audience yang terpapar narasi utama	Audience yang memahami narasi utama (X)	Audience paham yang memiliki kesan positif (Y)	Bobot (Z)	Nilai = $\frac{Y}{X} \times Z$
Komunikasi Publik	105	105	86	90%	$\frac{86}{105} \times 90\%$ = 73,71
	Jumlah permohonan informasi (X)	Jumlah permohonan yang tertangani (Y)		Bobot (Z)	Nilai = $\frac{X}{Y} \times Z$
Pelayanan Informasi	344	344		10 %	$\frac{344}{344} \times 10\%$ = 10
TOTAL NILAI REPUTASI POSITIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					83,71

	Jumlah pegawai yang mengisi kuesioner (W)	Jumlah Pertanyaan (X)	Jumlah skor hasil pengisian oleh pegawai (Y)	Jumlah skor maksimal (Z)	Nilai = $\frac{Y}{W \times X \times Z} \times 100$
Profesionalisme ASN di Biro KIP	61	17	3.154	4	$\frac{3.154}{4.148} \times 100$ = 76,04
Kualitas Pelayanan Perkantoran	59	24	4.311	4	$\frac{4.311}{5.664} \times 100$ = 76,11





Lampiran II : Rencana Kinerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN / KOMPONEN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79	Pengelolaan Portal Laport	117.200.000	BIRO KIP
					Pelayanan Informasi Publik	350.951.000	
					Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Publikasi Media Internal	1.505.000.000	
					Pelaksanaan Komunikasi Publik Melalui Jejaring Internal	350.000.000	
					Penyusunan Profil Kementerian	3.038.000	
					Kampanye Kolaborasi	1.153.592.000	
					Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi	1.252.617.000	
					Analisis Berita dan Opini Publik	748.140.000	
					Pengelolaan media sosial	2.502.676.000	
					Pengelolaan Jejaring Eksternal	1.754.628.000	
					Pengelolaan Hubungan Pers dan Media	1.050.725.000	
					Komunikasi Melalui Publikasi Media	3.417.300.000	
					Kegiatan Edukasi Publik	1.237.978.000	
					Dokumentasi dan Peliputan Pimpinan	3.024.436.000	
2	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	75	Pelayanan Rumah Tangga	180.020.000	BIRO KIP
					Pengembangan Kompetensi SDM	620.225.000	
					Pembinaan Administrasi Kepegawaian	471.547.000	
					Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	100.000.000	
					Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	200.000.000	
3	Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	75	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.564.997.000	BIRO KIP
					Kendaraan Bermotor	1.516.434.000	
					Perangkat Pengelolaan Data dan Informasi	707.573.000	
					Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran UPT/ Satuan Kerja	310.330.000	
					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja UPT/ Satker	210.066.000	
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran UPT/ Satker	127.454.000	
					Pengelolaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	226.953.000	





Lampiran III : Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA
BIRO KOMUNIKASI
DAN INFORMASI PUBLIK**

**Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Tahun 2024**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Budi Rahardjo, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Jenderal

Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19661111 199503 1 001

**Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik**

Budi Rahardjo, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I / (IV b)
NIP. 19701106 199703 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Reputasi Positif Kementerian Perhubungan	Nilai	79
SK 2	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Profesionalisme ASN di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Nilai	75
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang Bersih dan Akuntabel	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	75

Kegiatan

1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

Anggaran

Rp. 18.468.281.000
Rp. 1.571.792.000
Rp. 6.663.807.000

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris Jenderal

Ir. Novie Rivanto Rahardjo, MSEA,
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19661111 199503 1 001

Kepala Biro

Komunikasi dan Informasi Publik

Budi Rahardjo, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I / (IV b)
NIP. 19701106 199703 1 001

